

UNIVERSITAS DARMA PERSADA
PERPUSTAKAAN

YOSHINO SAKUZŌ DALAM
MASALAH PARTAI PROLETAR

Skripsi Sarjana ini diajukan sebagai
salah satu persyaratan mencapai gelar
Sarjana Sastra

oleh

TRI SUSANTI WAHYUNINGSIH

Nim : 02110049



02110049 106-07
324.2 0952 WAH-Y
PARTAI PROLETAR 2006
M.H.S.

PROGRAM STUDI DAN SASTRA JEPANG

FAKULTAS SASTRA

UNIVERSITAS DARMA PERSADA

JAKARTA

2006

Skripsi yang berjudul

YOSHINO SAKUZŌ DALAM
MASALAH PARTAI-PARTAI PROLETAR

Oleh

TRI SUSANTI WAHYUNINGSIH

NIM :02110049

Disetujui untuk diujikan dalam sidang ujian

Skripsi Sarjana oleh:

Pembimbing I

(Syamsul Bahri S.S)

Menyetujui

Ketua Jurusan

Pembimbing II

Bahasa dan Sastra Jepang

(Syamsul Bahri S.S)

(Nani Dewi Sunengsih S.S M.Pd)

UNIVERSITAS DARMA PERSADA
FAKULTAS SASTRA
JAKARTA

LEMBAR PENGESAHAN

Judul

YOSHINO SAKUZŌ DALAM
MASALAH PARTAI-PARTAI PROLETAR

SKRIPSI
diajukan sebagai salah satu syarat
meraih gelar sarjana sastra

telah disahkan

Pada Hari : Rabu

Tanggal : 9 Agustus 2006

Dekan Fakultas Sastra

Ketua Jurusan Bahasa
dan Sastra Jepang



(Dr Hj. Albertine Minderop MA)

(Syamsul Bahri S.S)

Skripsi Sarjana yang berjudul:

YOSHINO SAKUZŌ DALAM MASALAH PARTAI-PARTAI PROLETAR

Merupakan karya ilmiah yang saya susun dibawah bimbingan Bapak Syamsul Bahri S.S., dan tidak merupakan jiplakan Skripsi Sarjana atau karya orang lain, sebagian atau seluruhnya, dan isinya menjadi tanggung jawab saya sendiri. Pernyataan ini saya buat sesungguhnya di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 2006.

TRI SUSANTI WAHYUNINGSIH

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Karenanya dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Syamsul Bahri S.S., selaku pembimbing skripsi dan sebagai Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Jepang yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Nani Dewi Sunengsih S.S. M.Pd, selaku dosen pembaca dan sebagai Pembimbing Akademik;
3. Ibu Dra. Tini Prihatini selaku Ketua Sidang;
4. Ibu Metty Suwandany S.S selaku Sekertaris Penguji;
5. Keluargaku tercinta, Papa dan Mama, yang selalu mendukung dan mendoakan setiap langkahku, "thanks Mom and Dad", kakak-kakakku tercinta dan keponakanku tercinta, Salsa yang membuatku tersenyum jika sedang merasa kesulitan;
6. Sepupuku, Bhutut dan Diana yang membantuku dalam menterjemahkan dan pengetikan disaat penulis sedang lelah;

7. Seluruh staff Pengajar Fakultas Sastra Jepang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat;
8. Seluruh staff Perpustakaan Darma Persada yang telah membantu penulis mencari buku-buku referensi;
9. Seluruh staff Sekretariat yang telah membantu;
10. Putra, yang selalu memberiku semangat dan meluangkan waktu dalam mencari referensi-referensi penulisan skripsi ini;
11. Semua teman-temanku angkatan '02, khususnya kelas C, Nurul, Santi, Echi, Putri, Chi-chi, terima kasih untuk semua waktu yang telah kita lalui bersama,
12. Juga pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran dari pembaca.

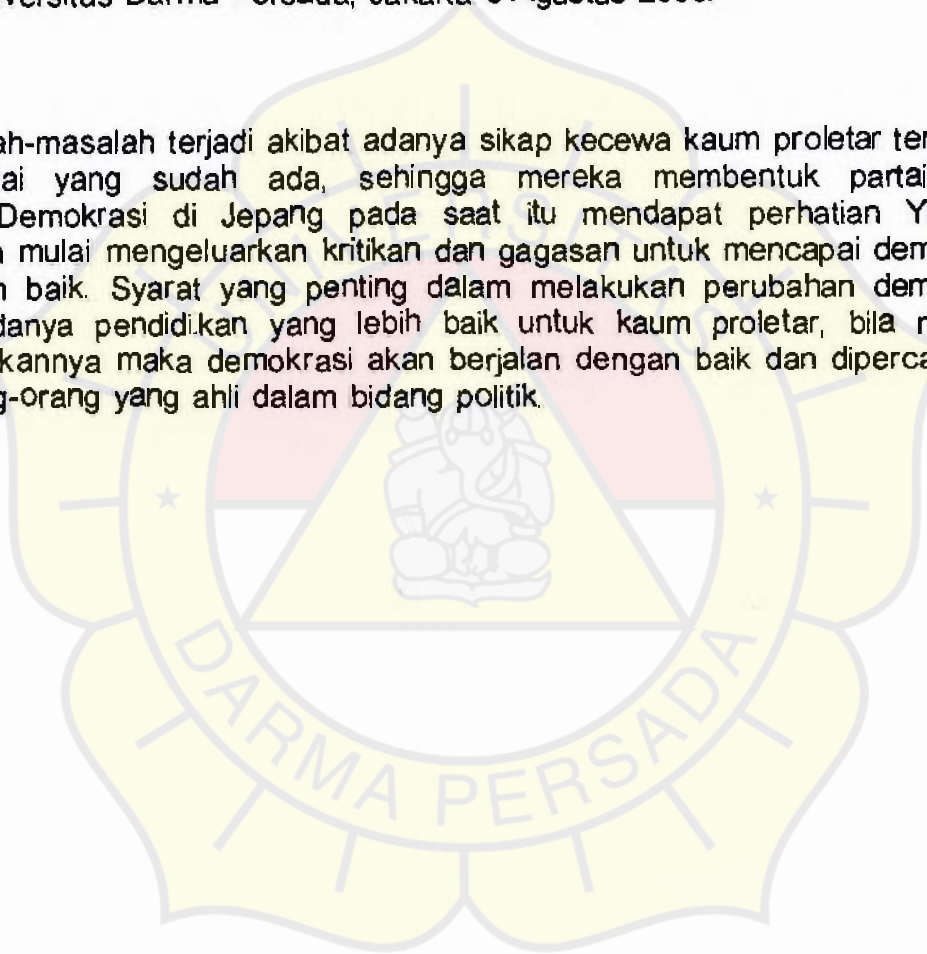
Jakarta, 9 Agustus 2006

Tri Susanti Wahyuningsih

ABSTRAK

Tri Susanti Wahyuningsih, YOSHINO SAKUZŌ DALAM MASALAH PARTAI-PARTAI PROLETAR, Program Studi Bahasa dan Sastra Jepang, Fakultas Sastra Universitas Darma Persada, Jakarta 9 Agustus 2006.

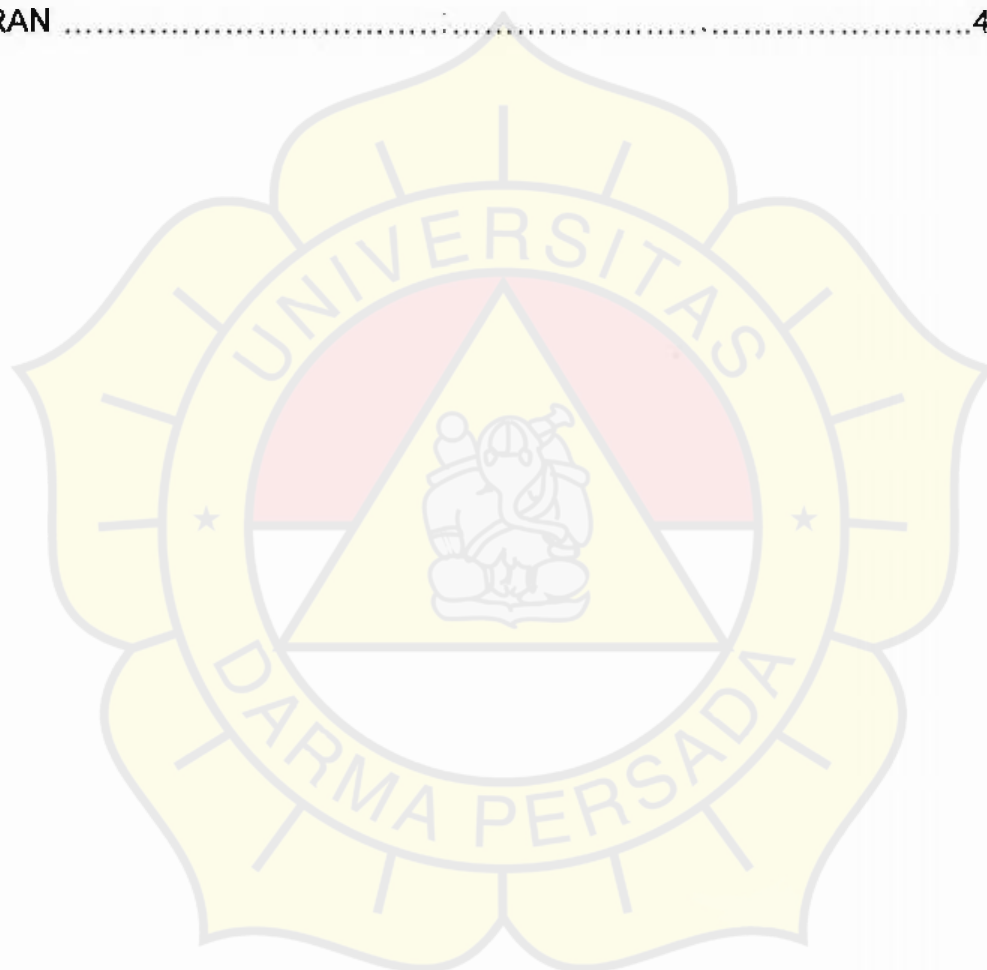
Masalah-masalah terjadi akibat adanya sikap kecewa kaum proletar terhadap partai-partai yang sudah ada, sehingga mereka membentuk partai-partai proletar. Demokrasi di Jepang pada saat itu mendapat perhatian Yoshino Sakuzō, ia mulai mengeluarkan kritikan dan gagasan untuk mencapai demokrasi yang lebih baik. Syarat yang penting dalam melakukan perubahan demokrasi adalah adanya pendidikan yang lebih baik untuk kaum proletar, bila mereka mendapatkannya maka demokrasi akan berjalan dengan baik dan dipercayakan oleh orang-orang yang ahli dalam bidang politik.



DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Ruang Lingkup	9
1.5 Metode Penelitian	9
1.6 Sistematika penulisan	9
BAB II RIWAYAT HIDUP YOSHINO SAKUZŌ	11
2.1 Masa Kecil Yoshino Sakuzō	11
2.2 Masa Remaja Yoshino Sakuzō	12
2.2.1 Yoshino pada saat di Tokyo, Cina, Eropa dan Amerika	15
BAB III YOSHINO SAKUZŌ DALAM MASALAH PARTAI-PARTAI	
PROLETAR	23
3.1 Pertentangan Ideologi pada tahun 1920-an	23
3.2 Peranan Yoshino Sakuzō dalam Pembentukan Partai Proletar	25
3.2.1 Latar Belakang dari Lahirnya Partai-partai Proletar	26
3.2.2 Kritik Yoshino Sakuzō terhadap Partai-partai Proletar	30
3.2.3 Gagasan Yoshino Sakuzō mengenai Partai Proletar	36

BAB IV	KESIMPULAN.....	43
BIBLIOGRAFI		45
KRONOLOGI RIWAYAT HIDUP YOSHINO SAKUZŌ		46
GLOSARI		49
LAMPIRAN		48



BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan masyarakat feodal masih dapat dirasakan setelah pemerintahan *Bakufu* dikembalikan ke tangan kaisar. Tekanan-tekanan yang berasal dari pihak luar semakin memperparah keadaan, terutama pada bidang politik. Dengan adanya persatuan antara kaum pendukung Tokugawa dan kaum loyalis dalam menghadapi pengusiran orang-orang asing di wilayah Jepang, akhirnya mereka dapat meruntuhkan kekuasaan ke-*shogunan* Tokugawa dan mampu mengembalikan kekuasaan kepada kaisar.

Tahun 1858 sampai tahun 1868 kaum yang menentang orang-orang barat mulai berubah pikiran. Mereka memiliki pendapat sendiri yaitu dengan secepat mungkin Jepang harus mengadakan perubahan dan mulai menyesuaikan diri dalam perkembangan yang terjadi dari negara-negara asing.

Pondasi yang diperlukan dalam mencapai modernisasi sudah lahir pada jaman Tokugawa yang telah berlangsung selama dua setengah abad. Pondasi tersebut yaitu masyarakat Jepang telah terbiasa patuh kepada pemimpin dengan sukarela mengorbankan dirinya.

Dari sifat patuh tersebut akhirnya membentuk cita-cita nasional dengan kesetiaan terhadap *Tennō* dan cinta kepada tanah air. Semangat yang dijadikan pegangan hidup bagi kaum *samurai* ini telah menjadi semangat yang dijunjung tinggi untuk mendorong tercapainya cita-cita membentuk masyarakat modern.¹

Walaupun kekuasaan politik telah diserahkan kembali kepada kaisar tetapi dasar ekonomi dan sistem pemerintahan feodal tetap terasa di tahun pertama periode Meiji. Oleh karena itu pemerintah mulai mencari cara untuk menghilangkan sisa-sisa feodal tersebut sebelum mereka mulai melaksanakan modernisasi secara efektif.

Untuk mempercepat proses tersebut pemerintah dengan segera mengembangkan industri dengan menghimpun modal swasta dan membantu pengembangan ekonomi.²

Pada tahun 1868 pemerintah secara bertahap melakukan perubahan dengan membentuk sistem pengganti pemerintahan *Bakufu* yang dipimpin oleh *Tennō* yang dibantu oleh tiga badan penasehat, yaitu:

1. Majelis Tinggi (*Sōsa*) yang dikepalai oleh pangeran;
2. Dewan Penasehat (*Gijō*) kelas satu, yang anggotanya diambil dari kaum bangsawan;
3. Dewan Penasehat (*Sanyō*) kelas dua, yang anggotanya terdiri dari golongan *kuge* dan golongan *samurai*.

¹ *Ibid*, hal.50

² *Ibid*, hal.51

Pada tanggal 6 April 1868, kaisar mengumumkan Piagam Sumpah Lima Pasal kepada para bangsawan, *Daimyō*, dan pejabat-pejabat lainnya yang berkumpul di istana Kyoto.³

Dokumen itu membentuk prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang kuat untuk memodernisasikan dan meniru negara barat dalam segala aspek kehidupan. Kelima undang-undang tersebut adalah:

1. Rapat secara musyawarah akan diberlakukan dan semua masalah yang muncul akan ditetapkan menurut pendapat umum dengan suara terbanyak;
2. Seluruh masyarakat Jepang harus bersatu dalam melaksanakan tugas negara;
3. Setiap orang diberikan kesempatan untuk memenuhi kehidupannya;
4. Adat istiadat dan kebiasaan lama yang janggal akan dihapuskan
5. Ilmu pengetahuan akan dicari di seluruh dunia untuk menetapkan secara kuat dasar-dasar negara.⁴

Piagam diatas merupakan dasar perubahan yang dipengaruhi oleh Yōkō Sōnai seorang liberalis beraliran Tosa dan gagasan dari Kido Takayoshi. Setelah itu diikuti oleh pembentukan struktur pemerintahn baru yang mengikuti pola Amerika. Kekuasaan legislatif dibagi menjadi dua yaitu, Majelis Tinggi dan Majelis Rendah.

³ *Ibid*, hal.52

⁴Chitoshi Yanaga, *Japan Since Perry* , McGraw-Hill Book Company, New York, 1949, hal.40

Selain itu kekuasaan administratif juga dibagi menjadi Departemen Administrasi Shinto, keuangan, masalah luar negeri dan pemerintahan daerah.⁵ Piagam tersebut merupakan konstitusi pertama Jepang modern. Tetapi pada kenyataannya corak pemerintahan tersebut mencontoh Tiongkok.⁶

Pada bulan Nopember pada tahun yang sama pemerintah mengganti nama Edo menjadi Tokyo. Selanjutnya pada tahun 1869 kelompok Satsuma, Chōshū, Hizen, dan Tosa mengambil tindakan untuk mengubur sistem feodal dengan menghapus kekuasaan dan hak-hak istimewa para *Daimyō*.⁷

Sementara perbaikan dalam lapangan ekonomi dan prasarana dilakukan dengan giat. Ide demokrasi mulai disebarkan melalui gagasan politik yang dikenal dengan nama Gerakan untuk Hak-hak Demokrasi (*Jiyu Minken Undo*).⁸

Para *samurai* tua mulai mengganggu di beberapa daerah dan mereka berpendapat bahwa pemberontakan tidak dapat meruntuhkan pemerintahan, sehingga mereka memutuskan untuk melakukan perubahan politik berdasarkan hak-hak demokrasi.

Alasan mereka melakukan itu adalah kemerdekaan nasional itu berarti pemerintah harus memenuhi semua kebutuhan dan keinginan rakyat dengan cara tanggap terhadap pendapat umum dan berusaha memperkuat bangsa.

⁵ Nurhayati, *op. Cit*, hal.52

⁶ *Ibid*, hal.53

⁷ *Ibid*, hal.53

⁸ Mattulada, *Perang dan Sempoa*, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1979, hal.132

Tujuan utama dari gerakan ini adalah menuntut agar diadakannya Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih karena pemerintahan pada saat itu merupakan monopoli kekuasaan oleh para bekas *samurai* dari beberapa *Han* saja yaitu Satsuma dan Chōshū.⁹

Pada tahun 1881, tuntutan itu semakin besar akhirnya pemerintah mengumumkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat akan dibentuk dan Undang-undang Dasar akan disusun tahun 1890. Ito Hirobumi diutus oleh pemerintah untuk menyiapkan Undang-Undang Jepang.¹⁰

Setelah Jepang menganut pola Jerman maka susunan pemerintahan pun ikut diperbaharui. Dalam undang-undang tersebut dengan jelas dicantumkan bahwa sumber semua kekuasaan adalah *Tennō*. Walaupun begitu *Tennō* tidak diharuskan menjalankan pemerintahan dan ia dibantu oleh para pembantu terdekat yang bertanggung jawab langsung kepadanya. Parlemen menurut undang-undang terdiri dari dua bagian yaitu:

1. Majelis Tinggi (*Sumitsuin*) anggotanya terdiri dari anggota keluarga *Tennō* dan pangeran-pangeran yang diangkat seumur hidup.
2. Majelis Rendah (*Shugiin*) anggotanya dipilih oleh rakyat yaitu kaum laki-laki yang sudah berusia 25 tahun dan mampu membayar pajak sebesar 15 *yen* atau lebih dalam kurun waktu satu tahun.¹¹

Sejak dihasilkannya keputusan *Tennō* untuk membentuk undang-undang, aliran demokrasi liberal mulai bangkit untuk membentuk partai politik.

⁹ Nurhayati, *op. Cit*, hal 60

¹⁰ *Ibid*, hal 61

¹¹ *Ibid*, hal.62

Tetapi partai-partai politik yang mereka bentuk bukan merupakan partai politik yang memiliki pengikut yang banyak dan dibentuk oleh keyakinan politik dengan mengumpulkan dukungan dari rakyat dan mereka menawarkan keikutsertaan rakyat.

Yoshino termasuk orang yang peduli dengan nasib politik negara Jepang. Dengan ilmu yang ia miliki dan menyumbangkan ide mengenai masalah kaum proletar. Dia sangat membela kaum ini terutama sejak adanya pemberontakan beras di Jepang. Pemberontakan itu terjadi karena meningkatnya harga barang-barang terutama beras. Ia membentuk partai untuk melawan partai yang sudah ada sebelumnya.

Partai politik yang dimiliki negara Jepang hanya merupakan sebuah perkumpulan sekelompok orang yang mempunyai tujuan yang sama untuk menyatukan kekuatan dan tidak berdasarkan suatu keyakinan untuk dasar pemerintahan.

Partai politik yang muncul di Jepang pertama kalinya adalah Partai Liberal (*Jiyuto*). Partai ini dipimpin oleh Itagaki Taisuke dari Tosa.¹² Anggota-anggota partai ini terdiri dari semua golongan yaitu kaum bangsawan, petani, kaya yang mempunyai kesamaan pendapat tentang kebebasan di tengah masyarakat.

Setelah *Jiyuto* lahir, muncul lagi Partai Progresif (*Kaishinto*) dibawah pimpinan Okuma Shigenobu. Partai ini memiliki tujuan yaitu memperbaiki

¹² *Ibid*

keadaan politik di pemerintahan, kemakmuran rakyat dan memberikan hak pilih kepada rakyat untuk memilih pimpinan mereka. Yoshino juga memberikan pengertian kepada rakyat bahwa politik itu tidak mudah, hal itu harus dilakukan dengan memiliki pendidikan yang luas atau mempercayakannya kepada yang mampu.

Dengan pengetahuan yang ia miliki, ia melakukan kritikan kepada pemerintahan melalui tulisan-tulisan di surat kabar dan majalah. Sistem demokrasi yang ia inginkan adalah sistem perwakilan dan pemerintah membuat ketetapan agar keadaan politik di Jepang stabil.

Pada tahun 1890 akhirnya pemerintah Jepang berhasil membuat Undang-Undang Negara Kekaisaran Jepang Raya. Dalam undang-undang tersebut telah menetapkan bahwa kabinet merupakan badan yang bertanggung jawab kepada *Tiennō*.¹³ Selain itu anggota Majelis Rendah dipilih oleh seluruh lapisan masyarakat yang telah berumur 20 tahun. Dengan demikian rakyat dapat turut serta dalam menentukan jalannya politik pemerintah Jepang.

Yoshino lahir di kota Furukawa, ia terlahir dari keluarga menengah. Walaupun demikian ia mampu mengenyam pendidikan sampai pascasarjana. Dalam perjuangannya ia dikagetkan dengan penyakit yang dideritanya.

¹³ *Ibid*, hal. 63

Yoshino masuk rumah sakit pada bulan Januari dan akhirnya ia meninggal dunia pada tahun 1933 karena mengidap penyakit Tuberculosis (TBC). Tetapi pada saat ajal menjemput ia belum menerbitkan bukunya yang berjudul Bunga Rampai Esai.

1.2 Permasalahan

Sejak meletusnya gerakan kebebasan hak rakyat pada jaman Taisho dan Meiji menimbulkan gejolak-gejolak dalam negara Jepang. Salah satu tokoh yang berperan aktif dalam demokrasi tersebut adalah Yoshino Sakuzō. Pokok permasalahannya adalah bagaimana peranan Yoshino dalam kancah politik pada jaman itu.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk membahas sejarah kehidupan Yoshino Sakuzō dari mulai ia kecil sampai ia dewasa dan juga ide-ide yang ia keluarkan dalam pergerakan demokrasi Jepang setelah Restorasi Meiji.

1.4 Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah yaitu mulai dari Yoshino lahir dan beranjak dewasa hingga ia meninggal dunia dalam perjuangannya untuk membangun negara Jepang supaya lebih maju.

1.5 Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini dibutuhkan metode yang benar supaya penulis dapat menganalisa, mendefinisikan dan memecahkan masalah dengan benar. Metode penulisan yang digunakan dalam menggarap skripsi ini adalah metode kepustakaan yang diperoleh penulis dari penelitian buku-buku yang berhubungan dengan tema skripsi ini. Pembahasan yang terdapat dalam skripsi ini bersifat deskriptif analisis, berdasarkan data yang berhubungan secara langsung maupun yang tidak langsung.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah dengan cara menyusun uraian babnya yang terdiri dari pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

- BABI** Merupakan pendahuluan, berisi latar belakang, permasalahan, ruang lingkup untuk menjaga cerita agar tidak keluar dari maksud awal, diikuti juga dengan tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II** Menceritakan riwayat singkat kehidupan Yoshino Sakuzō terutama pada saat ia terjun ke dalam dunia politik negara Jepang sampai akhir karir politiknya. Dalam bab ini juga sedikit disinggung mengenai keadaan keluarganya.
- BAB III** Pada bab ini diuraikan tentang peran Yoshino Sakuzō dalam demokrasi Jepang.
- BAB IV** Kesimpulan.